

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)****Status Verifikasi Administratif Lengkap****BIDANG : YUDIKATIF****LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL****UNIT KERJA : ANGGOTA****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SETYAWAN HARTONO**
2. Jabatan : **ANGGOTA KOMISI YUDISIAL**
3. NHK : **111180**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/40 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 1.850.000.000
2. Tanah Seluas 1.815 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/105 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.201 m2/400 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.200.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, PHOENIX SEPEDA PANCAL Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. LAINNYA, PHOENIX SEPEDA PANCAL Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
7. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI



Rp. 5.000.000

8. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 74.750.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 985.842.283**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.780.792.283**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.780.792.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.